



**ANALISIS TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TOTAL
ASET, JUMLAH SKPD DAN TEMUAN PEMERIKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RISYA MIRANTIE

NPM : 1415100252

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : RISYA MIRANTIE
NPM : 1415100252
PROGRAM STUDI : EKONOMI AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TOTAL ASET, JUMLAH SKPD, DAN TEMUAN
Pemeriksaan dalam Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
BINJAI

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NST, SE, M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYANITA, SH, M.Hum)

PEMBIMBING I

(ANGGI PRATAMA NST, SE, M.Si)

PEMBIMBING II

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RISYA MIRANTIE
Tempat/Tanggal lahir : Langsa, 20 Desember 1995
NPM : 1415100252
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Flamboyan Raya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019

Yang membuat pernyataan



RISYA MIRANTIE

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : RISYA MIRANTI
NPM : 1415100252
Program Studi : SOSIAL SAINS AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TOTAL ASET,
JUMLAH SKPD DAN TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media, formatikan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, JUNI 2019



RISYA MIRANTI



Acc. Duit
Rajap 3
22/12/19
Ang

**ANALISIS TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TOTAL
ASET, JUMLAH SKPD DAN TEMUAN PEMERIKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RISYA MIRANTIE
NPM : 1415100252

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



Acc. J. H. S. S. S.
D. H. S. S. S.
23
7 19

**ANALISIS TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TOTAL
ASET, JUMLAH SKPD DAN TEMUAN PEMERIKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Dujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

RISYA MIRANTIE
NPM 1415100252

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

UNIVERSITAS PUSTAKA
 No. 2518 / Perp / BP / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan
 27 JUN 2019
 Perpustakaan

FM-BF

Mari : Perumahan Meja Hijau

Medan, 27 Juni 2019
 Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat.



Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... %
 27 Juni 2019
 AN No. 100
 UNPAB
 THARMIZI HAKIM
 Cahyo Pramono, SE, MM

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : RISYA MIRANTIE
 Tempat/Tgl. Lahir : Langsa / 20 Desember 1995
 Nama Orang Tua : RIZARDI KARNAS
 N. P. M. : 1415100252
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085372002729
 Alamat : Jl. Flamboyan Raya

Datang berminat kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Tingkat Kelayakan Debit Aset, Jumlah SKPD dan Temuan Pemeriksaan Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bina Jaya, Selain itu saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah diberikan oleh Ya. Prodi dan Dekan.
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan jasanya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar hitam putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu lembar dari bagi mahasiswa yang melanjutkan Di ke S1 lampirkan ijazah dan ts sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas (orok 5 exemplar untuk pengantar dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sumpah di tandatangan pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan judul skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKPD (pada saat pengantar ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan pendaftaran, mohon berkas di masukkan ke dalam map
12. Bersedia melunasi biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1. [100] Ujian Meja Hijau	Rp.	450.000
2. [170] Administrasi Wisuda	Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	Rp.	100.000
4. [221] Bebas Lab	Rp.	0
Total Biaya	Rp.	2.050.000
5. 40% 50% 1 Tahun	Rp.	2.250.000
	Rp.	2.500.000
	Rp.	4.750.000

27/ Juni 2019
 (Sani)

Ukuran Tiga . S

Diketahui/Disetujui oleh :

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

 RISYA MIRANTIE
 1415100252

- Catatan :
- 1 Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 a. Telah dibayarkan Bakti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang kuliah aktif semester berjalan
 - 2. Dibayar Ranah 3 tingkat, untuk : Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs. ybs.

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 27 JUN 2019
 PAA
 TEQUH WAIYONG, SE, MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,3 Medan Fax. 061-8450077 P.O. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang beranda tangan di bawah ini :

1. Lengkap :

: RISYA MIRANTIE

2. No. Tgl. Lahir :

: Langsa / 21. Desember 1995

3. No. Pokok mahasiswa :

: 1415400252

4. Program Studi :

: Akuntansi

5. Konsentrasi :

: Akuntansi Sektor Publik

6. Jumlah Kredit yang telah dicapai :

: 127 SKS. IPK 3.27

7. Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Langsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat	<input type="checkbox"/>
Pengaruh tingkat pengungkapan terhadap pendapatan asli daerah di kota medan	<input type="checkbox"/>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi ditandatangani


 (Ir. Bhakti Alamnyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 16 Desember 2017

Pemohon,

 (RISYA MIRANTIE)


 Disahkan oleh
 Dekan
 (Drs. Amwar Santiaji, SE)

Tanggal : 18 Desember 2017

Disetujui oleh
 (S. Prati Akuntansi)

(Anggi Pratama Resution, SE., M.Si)

Tanggal : 18 Des 2017

Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing I :

(Anggi Pratama Resution, SE., M.Si)

Tanggal : 13 - 3 - 2018

Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing II :

(Oetoro Estantika, S.p., SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

16 Des 2017

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

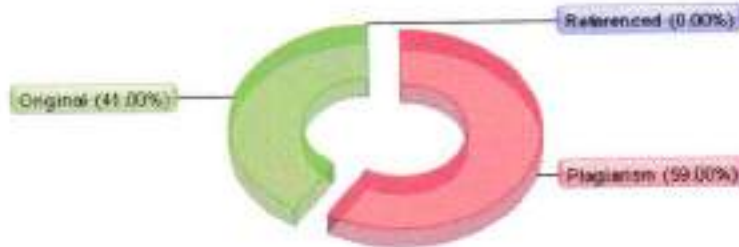
Analyzed document: 25/06/2019 09:39 42

"RISYA MIRANTIE_1415100252_AKUNTANSI.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart.



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 4 187 wds: 25655 <http://www.dpk.depkeu.pb.ac.id/uch/pe/pe-mu-714/mu-2019/teknik-standar-akuntansi-pem...>
- 5 138 wds: 18261 <http://repositori.unj.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36274/1/ROMS%20PERMAOI%20FCO.pdf>
- 6 159 wds: 19948 <https://lib.usababaya.gd.ac.id/bitstream/handle/1567.pdf>

[Show other Sources]

Processed resources details:

201-04721 - Failed

[Show other Sources]

Important notes

Wikipedia

Google Books

Ghostwriting services

Anti-cheating

[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]


Excluded Urls.




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp. (061) 845557
web site : www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Anngi Pratama Hasution SE, M.Si
 Pembimbing II : Oktarina Ehamilah Siregar SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : RISYA MIRANTIE
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100252
 Bidang Penulisan : SI
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kefayaan Daerah, Total Aset, Jumlah SP-ED dan Temuan pemeriksaan Dalam Pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14/05	Acc Study Revisi Akhir		

Medan 19 Juni 2015
Diketahui/Disetujui oleh
Dekan.


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Sudirman Km. 4.5 Telp. (061) 8483371
 website : www.pancaubi.ac.id email : unpa@pancaubi.ac.id
 Medan, Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Angra Pratama Habsution SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Octarina Khaniela Siregar S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : RISYA MIRANTIE
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100252
 Jengjang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Peragaan Barah, Total Aset, Umur SKD dan Terapan Pemeriksaan dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Permissible Foto Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20. 6. 19	Perbaiki penulisan skripsi di bagian sisi Bab 1, setiap tabel dan gambar silalah sumbernya, pada saat Bab 2.4 dan sesuai dgn ke Laman penulisan		
24 - 6 - 19	Isi, isi dan keterangkan konsep dan dalam pengungkapan ke dalam buku dan paragraf bar gambar tabel laporan operasional Bab 2 sumber masing2 variabel. dan isikan tabel penelitian dan yg penelitian		
26. 6. 19	Perbaiki penomoran Bab 1, silalah objek ke masing2 variabel, dan nama org ke skripsi perparat Ace 4 sidang usagi Arjo		

Dosen Pembimbing II

(Octarina Khaniela Siregar, SE., M.Si)

Medan, 24 Juni 2019
 Diketahui/Dijetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8450671
website : www.pancabudi.ac.id email : unpebu@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas
Fakultas
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Nama Mahasiswa
Jurusan/Program Studi
Nomor Pokok Mahasiswa
Jurang Pendidikan
Judul Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Anggi Pratama Rusution SE, M.Si
Oktavini Khamillah Siregar SE, M.Si
RISYA MIRANTIE
Akuntansi
1415100252
S-1

Analisis faktor faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5 Juli 2018	- Latar Belakang - Identifikasi masalah - Rumusan masalah dibuat 1 Rumusan - Tujuan juga sama - Tambahkan Variabel		
30/08/18	- Bahasan Konsep Kerangka uji faktor tujuan keputusan Kerangka konsep		
5/08/2018	Judul uji faktor ACE Seminar proposal		

Medan, 25 Juli 2018
Diketahui/Ditetapkan oleh
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp :061. 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email : unpan@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas	Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I	Anggi Pratama Nasution S.E. M.S
Dosen Pembimbing II	Oktarini Phamillah Siregar S.E. M.S
Nama Mahasiswa	RISYA MIRANTI
Program/Program Studi	Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa	1415100052
Program Penjurusan	Strata I
Judul Tugas Akhir/Skripsi	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28-7-2018	Perbaiki sistematisa penulisan proposal dalam peremotan setiap bab 1 & 3. Penjabaran nomor urut masalah. Tujuan dan hipotesis harus sama. mana teknik analisa data.	<i>[Signature]</i>	
3-8-2018	Perbaiki format tabel untuk tabel peneliti terdahulu dan tambah daftar pustaka.	<i>[Signature]</i>	
	Acc & Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing I

[Signature]

Medan, 25 Juli 2018
Diketahui/Disetujui oleh
Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasos@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu Tanggal, 10 Bulan, Juli Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi AKUNTANSI Semester Tahun Akademik 2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : Risya Mirantie
2. Npm : 141700252
3. Program Studi : AKUNTANSI
4. Tanggal Ujian : 10 Juli 2019
5. Judul Skripsi Lama : Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Langsa
6. Judul Skripsi Baru : Analisis Tingkat kepatuhan Daerah, Total Asset, dan Temuan Pemeriksaan Dalam pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Binyai

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Anggr Pratomo MSt, SE, M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Aulia, SE, MM	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Oktaria Hamidah Srg, SE, M.Si	
4	Anggota III/ Penguji I	Tunawati, SE, M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Patri Yanti Panggabean, SE, M.Si	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat Kekayaan Daerah, Total Aset, Jumlah SKPD, dan temuan pemeriksaan Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan metodenya maka penelitian ini termasuk sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui studi kasus yang dianalisis dengan melakukan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai tahun 2016-2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan daerah Pemerintah Kota Binjai telah di paparkan secara jelas dan lengkap pada LKPD Pemko Binjai. Seluruh jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah juga secara terperinci dijabarkan secara jelas. Total Aset Pemerintah Kota Binjai telah ditampilkan dalam neraca secara lengkap dan jelas disebutkan nilai dan jenisnya serta dicantumkan dalam lampiran LKPD Pemko Binjai. Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan. Laporan realiasi anggaran per SKPD telah dicantumkan secara rinci, selain itu dari sisi pendapatan, belanja, hingga pencatatan aset per SKPD juga telah dicatatkan dengan lengkap dan mudah dipahami. Pengungkapan Jumlah temuan pemeriksaan belum optimal, temuan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu persatu dalam penyajian laporan keuangan. Rekomendasi atas temuan Tim Audit BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai.

Kata Kunci : *Kekayaan Daerah, Aset Daerah, SKPD, Temuan Pemeriksaan, Pengungkapan Laporan Keuangan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Regional Wealth Level, Total Assets, Number of SKPD, and audit findings In Disclosure of Financial Statements of the Binjai City Government. Based on the method, this study is included as a descriptive study with a quantitative approach through case studies analyzed by analyzing the Binjai City Local Government Financial Statements (LKPD) in 2016-2017. The results of this study conclude that the regional wealth of the Binjai City Government has been clearly and completely explained in the LKPD of the City Government of Binjai. All types of regional tax revenues, regional retributions, the results of management of separated regional wealth and other regional revenues are also clearly described in detail. The regional assets of the Binjai City Government have been displayed in the balance sheet in full and clearly stated the value and type and are included in the attachment of the Binjai City Government LKPD. The total SKPD was reported. The budget realiation report per SKPD has been included in detail, in addition to the income, expenditure, and recording of assets per SKPD, it has also been completely and easily understood. Disclosure The number of audit findings is not optimal, the findings of the previous year and the current year are not mentioned one by one in the presentation of financial statements. Recommendations on the findings of the BPK RI Audit Team have not been fully followed up by the Regional Government of Binjai City

Keywords: Regional Assets, Regional Assets, SKPD, Audit Findings, Disclosure of Financial Statements

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena selalu mencurahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini yang merupakan persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama melakukan penyusunan sripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Suryanita, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E., M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Rizardi Karnas dan Ibunda Ainun Mardiah yang telah banyak berkorban baik moril juga materil, serta saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Biro Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Terima kasih kepada sahabatku, Taufik, Fenny, Yova, Fida, Nadia dan semua teman-teman yang telah memberikan kenangan manis selama dibangku perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca semua. Amiin.

Medan, Juli 2019
Penulis,

Risya Mirantie

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Akuntansi Keuangan Daerah	12
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	14
3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
5. Kekayaan Daerah	29
6. Total Aset	30
7. Temuan Audit	31
8. Jumlah SKPD	32
B. Penelitian Terdahulu	33

C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Definisi Operasional Variabel	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Profil BPKPAD Kota Binjai	45
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai	50
B. Pembahasan	54
1. Kekayaan Daerah	54
2. Aset Daerah.....	56
3. Jumlah SKPD	59
4. Temuan Audit	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Opini Audit BPK atas LKPD Pemko Binjai Tahun 2010 - 2017 2
Tabel 1.2	Originalitas Penelitian 11
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu 33
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 40
Tabel 3.2	Definisi Operasional..... 41
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan TA 2017-2016 54
Tabel 4.2	Penyajian Nilai Aset Dalam Neraca Pemko Binjai Tahun Anggaran 2017-2016 57
Tabel 4.3	Realisasi Anggaran Per SKPD Kota Binjai Tahun 2016 59
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Per SKPD Kota Binjai Tahun 2017 63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	39
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	44
Gambar 4.1 Berita Acara Serah Terima LKPD Kota Binjai Tahun 2016.....	52
Gambar 4.2 Surat Pengantar LKPD Kota Binjai Tahun 2016.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi akuntansi dalam organisasi sektor publik terutama di pemerintahan, telah dicanangkan sejak awal tahun 2000an yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah berbasis *full* akrual. Hal ini menjadi momentum yang sangat dinanti dalam perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia, di mana selama lebih dari 60 tahun Indonesia menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis kas.

Bila dibandingkan dengan basis kas, basis akrual lebih memiliki banyak kelebihan diantaranya yaitu basis akrual mengakui transaksi pada saat transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal inilah yang paling penting yang tidak bisa ditemukan jika menggunakan basis kas, sehingga dengan basis kas cenderung untuk tidak mencerminkan jumlah kas yang tersedia. Tentunya permasalahan basis akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan sangat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Dengan di terbitkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentunya akan membantu pemerintah untuk mewujudkan tercapainya proses akuntabilitas dan transparansi di pemerintah, sehingga tercipta *good governance*.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan akan terbebas dari KKN yang tentunya akan terlihat dari hasil audit dari BPK. Opini BPK tentunya akan didukung dengan banyaknya informasi yang diungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian tidak semua pemerintah daerah mengungkapkan semua informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kerangka konseptual dijelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dimana pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan keuangan dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini akan memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan.

Tabel 1.1 Opini Audit BPK atas LKPD Pemerintah Kota Binjai Tahun 2010-2017

No	Tahun	Opini BPK
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian DPP (WTP-DPP)
6	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7	2016	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
8	2017	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Sumber : Pemerintah Kota Binjai, 2018

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat, terjadi fluktuasi opini yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana pada tahun 2010-2013 Pemerintah Kota Binjai mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-

DPP), tahun 2015 kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kota Binjai berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fenomena yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini *adverse* dan *disclaimer* karena penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Namun, apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini WTP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Apakah laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah telah mencerminkan pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik. Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan dalam melihat pengungkapan laporan keuangan suatu pemerintah daerah, antara lain kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah SKPD, dan faktor temuan audit.

Kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial pemerintah daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang se sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari rekomendasi hasil audit BPK RI, masih terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti dalam hal pengelolaan kekayaan daerah.

Total aset menunjukkan ukuran daerah, aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Tetapi, jumlah aset yang besar sering menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangan bagi pemerintah di Indonesia karena belum semua aset yang dimiliki pemerintah dicatat dengan baik. Sehingga semakin besar jumlah aset semakin sulit dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan. Dari rekomendasi hasil audit BPK RI, masih terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti dalam hal pengelolaan aset daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.

Beberapa permasalahan yang terjadi seperti belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah dilihat dari tidak tercapainya seluruh target pendapatan yang sudah dianggarkan. Pencapaian realisasi anggaran baik pendapatan dan belanja menjadi permasalahan yang hampir terjadi pada sebagian besar pemerintahan daerah. Permasalahan selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan aset tetap, yang dapat dilihat dari mulai pengadaan, pencatatan hingga pelaporan. Permasalahan temuan audit merupakan rekomendasi dari auditor dalam rangka perbaikan penatausahaan keuangan pemerintah daerah, dapat dijadikan bahan masukan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Selanjutnya, besar kecilnya jumlah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada membutuhkan pengelolaan penatausahaan keuangan yang baik. Semakin besar jumlah SKPD yang ada, maka semakin besar pula permasalahan yang akan dihadapi.

Menurut Na'im (2000) Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam kualitas informasi keuangan terdapat dua jenis pengungkapan (*disclosure*) yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan (Haryadi, 2015).

Secara umum, terdapat 3 (tiga) konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan yaitu *adequate, fair, full disclosure*. Konsep yang paling

sering digunakan adalah *adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan minim yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep *fair disclosure* (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial. Sedangkan *full disclosure* (pengungkapan penuh) memiliki kesan penyajian laporan keuangan yang berlebihan sehingga banyak pihak berpendapat bahwa *full disclosure* merupakan konsep yang dapat merugikan perusahaan. (Haryadi, 2015).

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Efektivitas Pengendalian Intern;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pengungkapan yang Lengkap (*Full Disclosure*).

Berdasarkan pertimbangan di atas Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*);
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*);
3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*);
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan. Begitu pentingnya peran pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Karena para pengguna laporan keuangan memerlukan pengungkapan yang lengkap untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lengkap, menjadi penilaian penting dalam diperolehnya penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengungkapan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Tingkat Kekayaan Daerah, Total Aset, Jumlah SKPD, dan Temuan Pemeriksaan Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah dilihat dari tidak tercapainya seluruh target pendapatan yang sudah dianggarkan.

- b. Belum optimalnya pengelolaan aset tetap pada satuan kerja yang kurang tertib.
- c. Besarnya jumlah SKPD yang ada membutuhkan pengelolaan penatausahaan keuangan yang baik.
- d. Masih rendahnya tingkat tindak lanjut hasil temuan audit BPK.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai yang dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah kekayaan daerah (PAD) telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai?
2. Apakah total aset telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai?
3. Apakah jumlah SKPD telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai?
4. Apakah temuan audit telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengungkapan kekayaan daerah (PAD) dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
- b. Untuk menganalisis pengungkapan total aset dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
- c. Untuk menganalisis pengungkapan jumlah SKPD dalam laporan keuangan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
- d. Untuk menganalisis pengungkapan temuan audit dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

- b. Bagi Lembaga Yang Diteliti

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi terhadap

perkembangan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian sektor publik selanjutnya terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Asyrofi (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (studi atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa tahun anggaran 2014). Adapun variabel yang diteliti yaitu kekayaan daerah (PAD), total aset, dan jumlah SKPD.

Populasi yang diteliti adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Dalam pengambilan sampel, digunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh data penelitian sebanyak 103 laporan keuangan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset dan temuan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

tingkat pengungkapan LKPD. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian

No.	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Pemerintah Daerah se-Pulau Jawa	Kota Binjai
2	Tahun Penelitian	2014	2018
3	Variabel penelitian	Dependen variabel Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Independen variabel Kekayaan daerah (PAD), Total aset, dan Jumlah SKPD	Dependen variabel Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Independen variabel Kekayaan daerah (PAD), Total aset, Jumlah SKPD Temuan audit
4	Data Penelitian	2014	2016-2017
5	Metode Analisis	Regresi Linier Berganda	Analisis Deskriptif Kuantitatif

Berdasarkan perbedaan-perbedaan lokasi, tahun penelitian, data, metode analisis, serta penambahan variabel temuan audit yang digunakan menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik (Erlina , 2013).

a. Akuntansi Komersil Perusahaan (*Commercial Accounting*)

Akuntansi komersial merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersial, dikenal adanya proses pencatatan buku harian, penjurnalan, *posting* ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur, pembuatan neraca akhir dan laba rugi. Laporan keuangan dimaksud adalah laporan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk menuju laporan tersebut, dibutuhkan keahlian akuntansi agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh profesi akuntan. Keahlian akuntansi dimaksud adalah keahlian berupa pengenalan laporan neraca dan pos-pos neraca seperti aktiva, utang dan modal, laporan laba rugi dan pos-pos laba rugi seperti, pendapatan dan beban.

b. Akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi Sektor Publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi

sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat. Dalam praktek keseharian, pengelola entitas ekonomi perlu memiliki keahlian akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau yang lebih dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibedakan atas: (a) Akuntansi Pemerintahan dan (b) Akuntansi Sosial.

c. Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*)

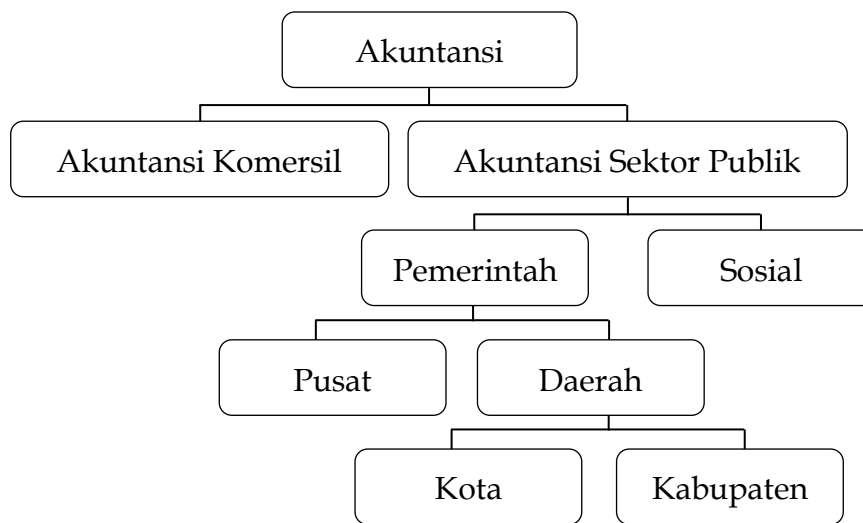
Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah.

d. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sosial ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti

partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (akuntansi pemerintah daerah) dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah
Sumber: Elina (2013)

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dinyatakan bahwa “Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan.

Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang otonomi yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud entitas pelaporan adalah: Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang

bertujuan umum, yang terdiri dari: (a)Pemerintah pusat (b)Pemerintah daerah (c)Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat (d)Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten terdiri dari: 1)Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3)Neraca 4)Laporan Operasional (LO) 5)Laporan Arus Kas (LRA) 6)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7)Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Secara garis besar, Laporan Keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*)
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Laporan Perubahan SAL
- b. Laporan Financial (*Financial Report*)
 - 1) Neraca

- 2) Laporan Operasional
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4) Laporan Arus Kas
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
- 5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang

- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Beban dari kegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 3) Transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
- 5) Pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

6) Surplus/defisit-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifatsertafungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini:

- a) Ekuitas awal.
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

- d) perubahannilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan Negara/daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan tersebut terdiri dari:

- a) Pemerintah Pusat
- b) Pemerintah Daerah
- c) Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan
- d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan

oleh fungsi akuntansi DPKD. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban membuat laporan arus kas adalah entitas pelaporan sedangkan entitas akuntansi yaitu masing-masing SKPD yang ada di Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewajiban menyusun laporan arus kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pendanaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, kecuali bunga yang dikapitalisir akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan

anggaran tersebut. akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Referensi silang antara CaLK, Neraca, LRA, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas artinya harus ada relevansi, korelasi atau keterkaitan dan konsistensi antara unsur-unsur di Laporan Keuangan dengan CaLK tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- 1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro.
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembaran muka laporan keuangan.
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- 7) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Anggaran;
- 2) Realisasi;
- 3) Prosentase pencapaian;
- 4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 5) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 7) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- 8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 9) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- 10) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP

Nomor 71 Tahun 2010). SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Suryani (2016) menyatakan guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi LKPD sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SAP. Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto, 2011). *Mandatory Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. *Voluntary Disclosure* merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

- a. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi);
- b. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro;
- c. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
- d. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan;
- e. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Pengungkapan lainnya;
- g. Penutup

Tingkat pengungkapan pada LKPD disesuaikan dengan tingkat pengungkapan pada PSAP.

5. Kekayaan Daerah

Berdasarkan teori *stewardship* maka pemerintah daerah berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih baik pada laporan keuangannya (Khasanah, 2014). Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Kekayaan pemerintah daerah diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan

tingkat kemandirian daerah (Santosa, 2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga Pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel (Setyaningrum, 2012).

6. Total Aset

Dalam PSAk No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut/ manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan.

Total aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber – sumber daya karena alasan sejarah dan budaya (Heriningsih, 2013).

7. Temuan Pemeriksaan

Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kreadibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dengan memeriksa keuangan, kinerja, serta pemeriksaan lain dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan BPK tersebut berupa temuan, opini, kesimpulan, serta dapat pula berbentuk rekomendasi.

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta terindifikasi sebagai suatu pelanggaran. Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau mendapatkan peluang perbaikan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan penyimpangan dengan adanya bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan. Auditor harus menginvestigasi secara tepat untuk menentukan kriteria audit yang dilanggar dan menentukan rekomendasi tindakan perbaikan (Zulfikar, 2013).

Kualitas perumusan opini bergantung pada kualitas audit yang dilaksanakan.

Menurut Bawono (2010) kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil auditnya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku.

8. Jumlah SKPD

Diferensiasi fungsional atau sering disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Negera SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peneliti mencoba menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proksi untuk menjelaskan kompleksitas.

Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Peneliti mencoba menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proksi untuk menjelaskan kompleksitas. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam

membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil
1.	Amiruddin Zul Hilmi (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi	Variabel Y Pengungkapan Laporan Keuangan Variabel X 1. Kekayaan Daerah 2. Tingkat Ketergantungan 3. Total Aset 4. Jumlah Penduduk 5. Jumlah SKPD 6. Jumlah Temuan 7. Tingkat Penyimpangan	Regresi Linier	Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi bahwa aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jumlah temuan BPK dalam audit LKP berhubungan tidak

					signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan Tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.
2.	Sucahyo Herining sih (2013)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Y Pengungkapan Laporan Keuangan Variabel X 1. Karakteristik Pemerintah : - Tingkat Ketergantungan - Total Aset 2. Tingkat Akuntabilitas Pemerintah: - Opini auditor - SPI laporan keuangan pemerintah daerah - Kepatuhan terhadap Perundang-undangan - LKPD	Regresi Linier	Hasil penelitian ini menunjukkan : 1. Karakteristik pemerintah diukur dengan menggunakan tingkat ketergantungan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,528 yang berarti menunjukkan secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah (opini audit, tingkat penyimpangan terhadap SPI, dan penyimpangan terhadap perundang-undangan) secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Indonesia.
3.	Fegy Yuliant (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan	Variabel Y Pengungkapan Laporan Keuangan Variabel X 1. Pengungkapan Wajib, 2. Kekayaan	Regresi Linier	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah

		pemerintah daerah(studi pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia)	<p>Pemda,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Umur Administratif Pemda 4. Pendapatan Transfer, 5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 		daerah. Hal ini berarti tingginya pengawasan dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menyajikan informasi yang lebih banyak terkait penggunaan pendapatan transfer tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sementara kekayaan pemda dan umur administratif pemda tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD.
4.	M. Zaenuddin Asyofi (2016).	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (studi atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/ kota di pulau jawa tahun anggaran 2014)	<p>Variabel Y Pengungkapan Laporan Keuangan</p> <p>Variabel X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan daerah 2. Total aset 3. Temuan pemeriksaan 4. Jumlah SKPD 	Regresi Linier	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset dan temuan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
5.	Heri Atapson V Girsang (2015)	Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012)	<p>Variabel Y Pengungkapan Laporan Keuangan</p> <p>Variabel X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah, 2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, 3. Diferensiasi fungsional pemerintah 	Regresi Linier	Tidak satupun dari variabel yang diuji yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan, atau dengan kata lain variabel ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional pemerintah daerah, pembiayaan utang pemerintah daerah, tingkat ketergantungan

			daerah 4. pembiayaan utang pemerintah daerah, 5. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan 6. Umur pemerintahan daerah		pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan umur pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.
--	--	--	---	--	--

C. Kerangka Konseptual

PAD merupakan salah satu pengukuran dari kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka menunjukkan semakin baik pula kinerja daerah tersebut. Maka semakin besar dorongan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan *stakeholders*. Amalina (2014) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, sementara itu penelitian Puspita (2011) menyebutkan bahwa ratio PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Semakin baik kinerja pemerintah semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Retina (2008) menunjukkan bahwa jumlah aktiva berkorelasi negatif tetapi dengan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Martani (2010) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian Hilmi (2011) dan Zulfikar (2013) memberi hasil yang berbeda, yaitu jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan koreksi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

Menurut Khasanah (2014), semakin sedikit diferensiasi fungsional semakin tinggi tingkat pengungkapan. Karena semakin sedikit diferensiasi fungsional maka kompleksitas semakin menurun yang menyebabkan tingkat pengungkapan semakin tinggi atau pengungkapan yang lebih baik. Walaupun diferensiasi fungsional (SKPD) jumlahnya banyak namun kegiatan antar SKPD cenderung generik maka tidak membutuhkan banyak pengungkapan.

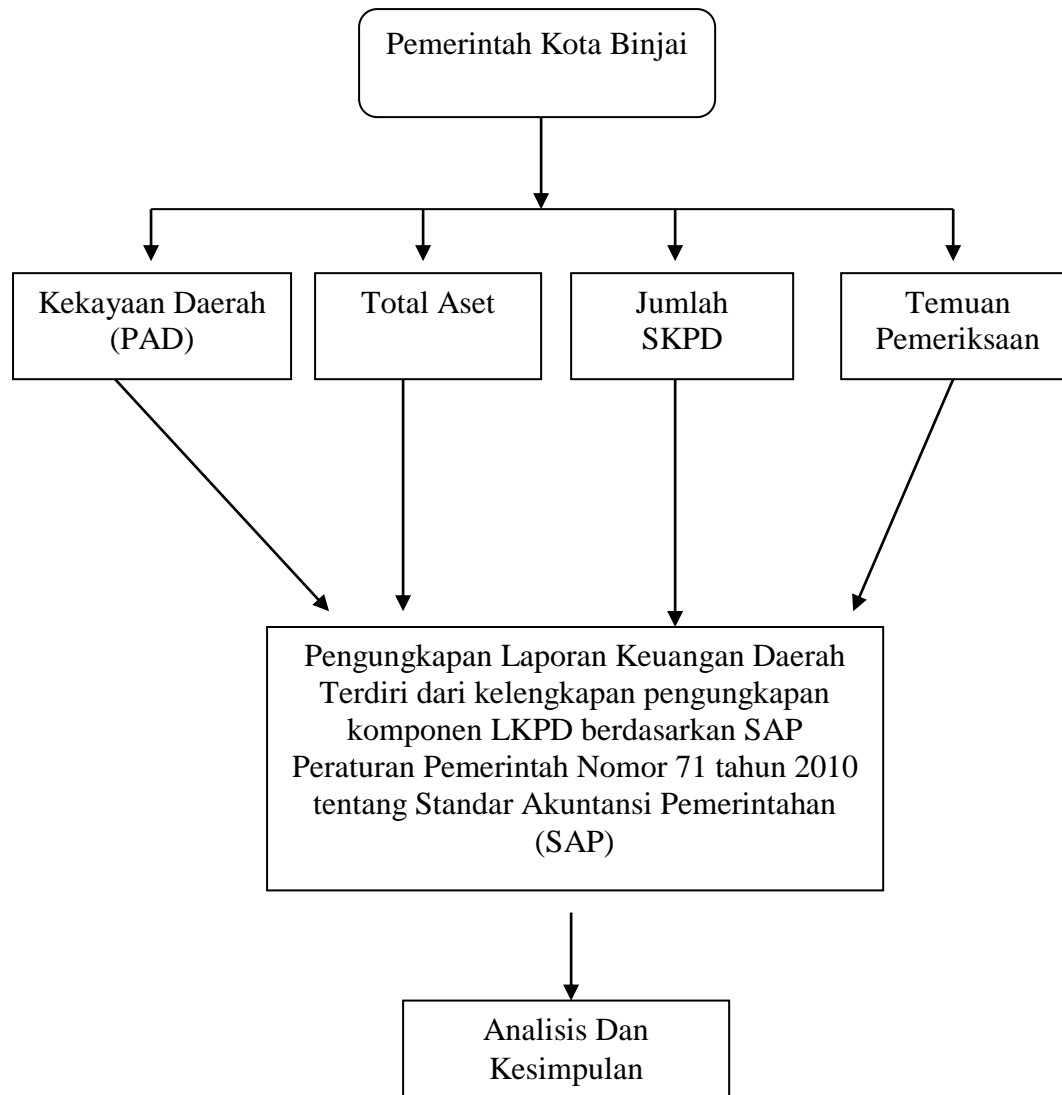
Penelitian Martani (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah, kompleksitas, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi).
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro.

3. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Pengungkapan lainnya.
7. Penutup.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dituangkan dalam bagan kerangka konseptual pembahasan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012) adalah:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Binjai pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

Penelitian dimulai pada bulan September hingga Desember 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	Des-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19	Jun-19	Jul-19
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Riset ke Lokasi Penelitian		40						
6	Bimbingan Skripsi								
7	Sidang Meja Hijau								

C. Definisi Operasional Variabel

Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah	Terdiri dari kelengkapan pengungkapan komponen LKPD berdasarkan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))	komponen LKPD berdasarkan SAP LRA, LPSal, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK
Kekayaan Daerah (PAD)	Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun	Total pendapatan dari: 1)hasil pajak daerah; 2)hasil retribusi daerah; 3)hasil perusahaan untuk daerah, dan

	2004)	hasil pengelolaan daerah yang dipasarkan; 4)lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Total Aset	Semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber – sumber daya karena alasan sejarah dan budaya, Heriningsih (2013).	Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain
Jumlah SKPD	Jumlah Pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (Girsang, 2015)	Jumlah SKPD
Temuan Pemeriksaan	Jumlah temuan pemeriksaan (audit) yang dilakukan BPK. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara)	Jumlah temuan pemeriksaan BPK

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) yang menyatakan bahwa: “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Selain itu dilakukan wawancara dengan para penyusun LKPD (Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah) Kota Binjai yaitu pada Bidang Akuntansi BPKPAD Kota Binjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai.

F. Teknik Analisis Data

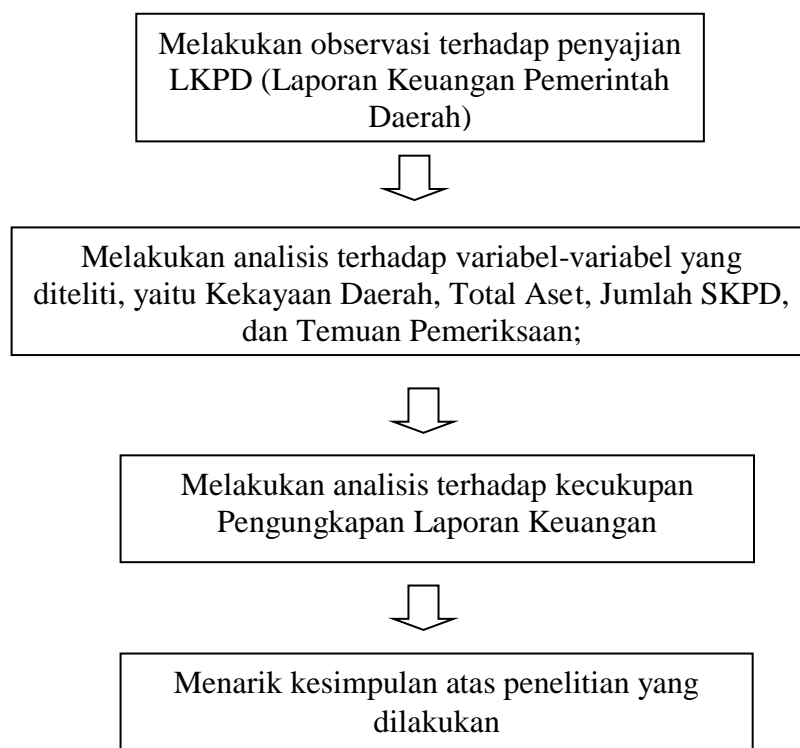
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktanya.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen yang telah digunakan sebelumnya dalam penelitian-penelitian terkait. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah SKPD, dan temuan pemeriksaan. Alasan pemilihan keempat variabel tersebut karena dapat mewakili karakteristik pemerintah daerah dari segi kekayaan

finansial, ukuran daerah, dan kompleksitas serta pengaruh eksternal melalui hasil audit.

Variabel kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial pemerintah daerah, variabel total aset menunjukkan ukuran daerah, sedangkan variabel jumlah SKPD menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah. Ketiga variabel tersebut sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah. Variabel temuan pemeriksaan yang diukur dengan jumlah temuan digunakan sebagai proksi dari hasil audit.

Dengan menggunakan ulasan faktor intervensi terhadap data yang diperoleh sehingga lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan standar angka-angka. Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota Binjai dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah”, olehkarena itu salah satu fungsi utama dari BPKPAD Kota Binjai adalah sebagai Badan yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya.
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya(ekstensifikasi/intensifikasi).
- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran.
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah.
- b. Pengkajian kebutuhan daerah.
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
- e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
- f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.

2. Aspek Pendapatan Daerah, tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan
- b. Penyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.

3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi :

- a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
- b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai.
- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Langsung;

- c. Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
4. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja Dan Pendapatan.
 5. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Penetapan PBB Dan BPHTB;
 - c. Sub Bidang Pengendalian PBB Dan BPHTB.
 7. Bidang Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Sub Bidang Penetapan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya.
 8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Optimalisasi Aset;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah.
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai

Laporan keuangan Kota Binjai telah disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, dan disampaikan kepada DPR/DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal karenanya laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Hal ini terlihat bahwa:

- a. Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang mensyaratkan 7 unsur laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Arus Kas; dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hal ini seperti tertuang dalam lembar pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah bahwa Laporan Keuangan Daerah telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual. Berikut format pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah tentang kelengkapan penyerahan LKPD.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Binjai, Maret 2018

WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD IDAHAM

Selain itu, kelengkapan penyusunan LKPD Kota Binjai juga dapat dilihat dari Berita Acara Serah Terima LKPD antara Pemerintah Kota Binjai dengan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, seperti berikut:

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimili (061) 4538140 Medan 20152

**BERITA ACARA
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 Ayat (3), menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sehubungan dengan hal tersebut pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Maret 2017, saya:

Nama : H. M. Idaham, S.H., M.Si.
Jabatan : Walikota Binjai

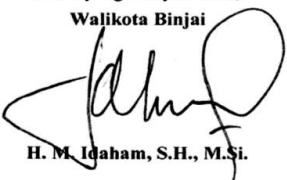
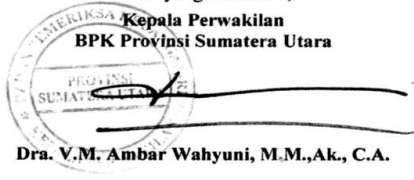
Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah;
2. Neraca;
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan SAL;
7. Laporan Perubahan Ekuitas;
8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
9. Laporan Hasil Reviu Inspektorat;
10. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Rekapitulasi Dana Desa.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M.,Ak., C.A.
NIP : 196009241990032002
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara

Untuk dipergunakan dalam pemeriksaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<p>Pihak yang menyerahkan, Walikota Binjai</p>  <p>H. M. Idaham, S.H., M.Si.</p>	<p>Pihak yang menerima, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara</p>  <p>Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M.,Ak., C.A.</p>
---	---

**Gambar: 4.1
Berita Acara Serah Terima LKPD Kota Binjai Tahun 2016**

- b. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai selalu disusun tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu selambatnya 3 bulan (31 Maret) setelah berakhirnya tahun anggaran.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.6 Telepon/Fax (061) 42088521
 BINJAI - 20713

Binjai, 31 Maret 2017

Kepada Yth :
 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
 Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
 di -
 Medan.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900- 544 BPKPAD/2017

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016.	2 (dua) Set	Diserahkan pada tanggal 31 Maret 2016 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Diterima tanggal
 1 Maret 2017

 Oleh :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

 AFFAN SIREGAR, SE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19621006 199008 1 001

Gambar: 4.2
Surat Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2016

B. Pembahasan

1. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial pemerintah daerah. Secara rinci jumlah kekayaan daerah telah di paparkan secara jelas dan lengkap pada LKPD Pemko Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2017

Uraian	Jumlah		Jumlah	
	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	45.156.276.875,00	45.555.502.540,38	100,88	34.720.281.530,56
Retribusi Daerah	7.263.695.738,38	4.907.246.694,00	67,56	4.384.932.321,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.212.978.767,00	3.385.642.489,00	80,36	3.234.448.564,00
Lain-lain PAD yang sah	113.724.089.885,00	85.369.229.974,10	75,07	54.999.835.168,80
JUMLAH PAD	170.357.041.265,38	139.217.621.697,48	81,72	97.339.497.584,36
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil Pajak	21.447.221.000,00	23.399.166.834,00	109,10	30.240.668.718,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.082.156.000,00	920.628.036,00	44,22	1.727.075.207,00
Dana Alokasi Umum	574.469.158.000,00	564.377.582.000,00	98,24	574.469.158.000,00
Dana Alokasi Khusus	120.316.335.000,00	100.753.593.803,00	83,74	141.490.578.295,00
Sub Jumlah	718.314.870.000,00	689.450.970.673,00	95,98	747.927.480.220,00
Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya				
Bagi Hasil Pajak	69.231.251.810,62	43.883.166.054,00	63,39	61.312.899.913,00
Sub Jumlah	69.231.251.810,62	43.883.166.054,00	63,39	61.312.899.913,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya				
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	8.819.111.400,00

Uraian	Jumlah		Jumlah	
	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5
Sub. Jumlah	0,00	0,00	0,00	8.819.111.400,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	787.546.121.810,62	733.334.136.727,00	93,12	818.059.491.533,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	49.238.561.749,06
JUMLAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	49.238.561.749,06
JUMLAH REALISASI PENDAPATAN	964.903.163.076,00	879.551.758.424,48	91,15	964.637.550.866,42

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Binjai per 31 Desember 2016-2017 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berikut anggaran dan realisasi tahun berjalan serta tahun sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan porsi terbesar dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai.

Secara lebih detil telah dirincikan total pendapatan dari:

- 1) Pendapat hasil pajak daerah;
- 2) Pendapatan hasil retribusi daerah;
- 3) Pendapatn hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah, Bapak Agus Kirnanda, dijelaskan bahwa pengungkapan kekayaan pemerintah daerah yang di proyeksikan dengan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah telah diungkapkan secara detail dan berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Berdasarkan pengungkapan ini, mengindikasikan bahwa pengungkapan kekayaan daerah yang di proyeksikan dengan Pendapatan Daerah telah diungkapkan dengan jelas dan lengkap.

2. Aset Daerah

Aset daerah Pemerintah Kota Binjai telah di tampilkan dengan lengkap dan jelas, jumlah aset dalam neraca telah jelas disebutkan nilai dan jenisnya dilampirkan dalam lampiran LKPD Pemko Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penyajian Nilai Aset dalam Neraca Pemerintah Kota Binjai TA 2016 dan 2017

URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	43.315.848.339,84	16.350.504.503,32
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	43.346.533,00	43.296.533,00
Kas di BLUD	1.952.990.649,00	1.812.679.156,00
Kas Lainnya	483.524.785,83	1.097.099.278,83
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	46.078.583.332,84	42.317.545.282,00
Piutang Lainnya	57.583.356.530,84	63.914.689.302,61
Penyisihan Piutang	(47.513.211.204,15)	(44.655.563.358,20)
Beban Dibayar Dimuka	50.000.000,00	0,00
Persediaan	10.562.796.172,00	13.142.994.395,92
JUMLAH ASET LANCAR	112.557.235.139,20	94.023.245.093,48
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.752.539,00	3.522.752.539,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.752.539,00	3.522.752.539,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.376.225.047,83	20.633.872.910,42
Investasi Permanen Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	20.476.225.047,83	20.733.872.910,42
Penyisihan Piutang Dana Bergulir		

Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(3.522.752.539,00)	(3.522.752.539,00)
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(3.522.752.539,00)	(3.522.752.539,00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	20.476.225.047,83	20.733.872.910,42
ASET TETAP		
Tanah	391.076.587.339,18	388.022.799.239,47
Peralatan dan Mesin	379.728.827.285,06	349.288.426.985,86
Gedung dan Bangunan	345.472.111.813,15	363.468.610.628,04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.945.454.323.589,86	1.869.944.034.790,70
Aset Tetap Lainnya	60.694.513.643,32	59.094.433.041,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.237.450.478,00	2.777.413.485,00
Akumulasi Penyusutan	(2.041.899.875.331)	(1.937.896.187.581)
JUMLAH ASET TETAP	1.091.763.938.817,23	1.094.699.530.589,27
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	294.710.000,00	294.710.000,00
Aset Lain-lain	19.568.108.379,27	22.558.613.268,27
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(16.190.507.694,12)	(16.245.352.620,11)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(128.622.000,00)	(24.695.500,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	3.543.688.685,15	6.583.275.148,16
JUMLAH ASET	1.228.341.087.689	1.216.039.923.741,33

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat seluruh komponen aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap telah dicantumkan secara rinci. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kota Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan

berdasarkan pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Sistem Informasi Keuangan Daerah, Bapak Junaidi P. Marbun, dijelaskan bahwa pengungkapan penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, telah diungkapkan secara detil dan berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Berdasarkan pengungkapan ini, mengindikasikan bahwa pengungkapan nilai aset telah diungkapkan dengan jelas dan lengkap.

3. Jumlah SKPD

Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan, jumlah anggaran dan realisasi anggaran telah jelas di cantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Realiasi Anggaran per SKPD Kota Binjai Tahun 2016

Nama SKPD	Pendapatan LRA	Belanja	Transfer	Pembiayaan	SiLPA
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	00,00	308.860.521.389,00	00,00	00,00	(308.860.521.389,00)
Dinas Kesehatan	9.389.483.100,00	81.382.369.467,00	00,00	00,00	(71.983.886.367,00)
RSUD Dr.R.M.Djoelham	34.202.628.470,00	88.226.265.190,00	00,00	00,00	(54.023.636.720,00)
Dinas	35.991.800,00	146.420.371.51	00,00	00,00	(146.384.379.71

Pekerjaan Umum		2,00			2,00)
Dinas Tarukim	676.601.700,00	34.445.554.393,00	00,00	00,00	(33.768.952.693,00)
Bappeda	00,00	5.954.277.986,00	00,00	00,00	(5.954.277.986,00)
Dinas Perhubungan	1.976.432.976,00	12.055.870.597,00			(10.079.437.621,00)
BLH	00,00	5.053.261.093,00			(5.053.261.093,00)
DKP	611.393.000,00	40.174.970.922,00			(39.563.577.922,00)
Dinas Catpil	00,00	3.447.527.991,00			(3.447.527.991,00)
Badan KB dan PP	00,00	8.937.177.889,00			(8.937.177.889,00)
Dinas Sosial	00,00	9.030.137.906,00			(9.030.137.906,00)
Dinas Koperasi	00,00	7.489.811.532,00			(7.489.811.532,00)
Badan Kesbang	00,00	5.632.261.296,00			(5.632.261.296,00)
Satpol-PP		6.912.296.173,00			(6.912.296.173,00)
BPBD	26.425.000,00	10.673.269.888,00			(10.464.844.888,00)
DPRD		5.534.295.397,00			(5.534.295.397,00)
Walikota dan Wakil Walikota		539.207.408,00			(539.207.408,00)
Sekretariat Daerah		40.437.081.656,00			(40.437.081.656,00)
Sekwan		16.441.799.468,00			(16.441.799.468,00)
BPKAD selaku SKPD		7.351.227.630,00			(7.351.227.630,00)
BPKAD selaku PPKD	881.103.118.875,22	12.367.906.200,00	487.667.250,00	51.993.127.117,32	867.339.452.764,12
Dispenda	35.502.703.085,20	17.421.003.555,00			18.081.699.530,20
Inspektorat		5.119.030.317,00			(5.119.030.317,00)
Kantor	844.341.860,00	2.253.104.179,00			(1.408.762.319,00)

Terpadu		0			00)
Binjai Selatan		4.916.826.266,0 0			(4.916.826.266,00)
Binjai Timur		6.101.448.016,0 0			(6.101.448.016,00)
Binjai Barat		3.727.387.913,0 0			(3.727.387.913,00)
Binjai Kota		4.341.855.400,0 0			(4.341.855.400,00)
Binjai Utara		6.234.282.919,0 0			(6.234.282.919,00)
BKD		6.535.029.970,0 0			(6.535.029.970,00)
Kel. Rambung Dalam		138.062.319,00			(138.062.319,00)
Kel. Tanah Merah		150.589.527,00			(150.589.527,00)
Kel. Rambung Timur		151.550.669,00			(151.550.669,00)
Kel. Tanah Seribu		142.049.500,00			(142.049.500,00)
Kel. Bhakti Karya		110.892.034,00			(110.892.034,00)
Kel. Binjai Estate		219.444.424,00			(219.444.424,00)
Kel. Pujidadi		162.198.000,00			(162.198.000,00)
Kel. Rambung Barat		128.543.827,00			(128.543.827,00)
Kel. Tanah Tinggi		128.180.421,00			(128.180.421,00)
Kel. Sumber Karya		187.484.791,00			(187.484.791,00)
Kel. Tunggoro		259.633.868,00			(259.633.868,00)
Kel. Timbang Langkat		179.030.486,00			(179.030.486,00)
Kel. Sumber Mulyo Rejo		182.801.166,00			(182.801.166,00)
Kel. Dataran Tinggi		129.648.500,00			(129.648.500,00)
Kel. Mencirim		178.516.700,00			(178.516.700,00)

Kel. Sukaramai		164.901.838,00			(164.901.838,00)
Kel. Limau Sundai		158.871.000,00			(158.871.000,00)
Kel. Payaroba		165.911.607,00			(165.911.607,00)
Kel. Sukamaju		148.566.896,00			(148.566.896,00)
Kel. Limau Mungkur		138.345.433,00			(138.345.433,00)
Kel. Bandar Senembah		168.189.246,00			(168.189.246,00)
Kel. Binjai		115.651.621,00			(115.651.621,00)
Kel. Berngam		213.557.871,00			(213.557.871,00)
Kel. Setia		131.761.700,00			(131.761.700,00)
Kel. Satria		151.028.163,00			(151.028.163,00)
Kel. Tangsi		139.296.126,00			(139.296.126,00)
Kel. Kartini		148.797.281,00			(148.797.281,00)
Kel. Pekan Binjai		186.039.488,00			(186.039.488,00)
Kel. Cengkeh Turi		175.175.501,00			(175.175.501,00)
Kel. Damai		177.862.776,00			(177.862.776,00)
Kel. Jati Karya		139.611.800,00			(139.611.800,00)
Kel. Nangka		129.062.000,00			(129.062.000,00)
Kel. Kebun Lada		112.804.900,00			(112.804.900,00)
Kel. Jati Makmur		132.363.616,00			(132.363.616,00)
Kel. Jati Negara		135.547.397,00			(135.547.397,00)
Kel. Pahlawan		155.379.889,00			(155.379.889,00)
Kel. Jati Utomo		119.436.615,00			(119.436.615,00)
Kantor PMK		2.619.933.886,0 0			(2.619.933.886, 00)
Kantor Perpustakaan		1.748.611.322,0 0			(1.748.611.322, 00)
Dinas Pertanian	227.831.000,00	12.591.378.189, 00			(12.363.547.189, 00)
Dinas	31.600.000,00	8.034.462.385,0			(8.312.862.385,

Pariwisata		0			00)
Jumlah	964.637.550.86	945.078.606.29	487.667.2	51.993.127.1	18.163.184.659
	6,42	6,00	50,00	17,32	,32

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2017

Penggunaan SILPA TA 2016 berasal dari SILPA TA 2015 merupakan selisih lebih/kurang realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun periode pelaporan.

Tabel 4.4
Realiasi Anggaran per SKPD Kota Binjai Tahun 2017

Nama SKPD	Pendapatan LRA (Rp)	Belanja (Rp)	Transfer (Rp)	Pembiayaan (Rp)	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	30.108.636.208,0 0	267.502.875.134,00	-	-	(237.394.238.926,00)
Dinas Kesehatan	9.121.715.700,00	83.887.861.099,00	-	-	(74.766.145.399,00)
RSUD Dr.R.M.Djoelham	30.272.486.612,0 0	80.303.761.015,96	-	-	(50.031.274.403,96)
Dinas Pekerjaan Umum	34.129.510,00	87.360.647.656,00	-	-	(87.326.518.146,00)
Dinas Tarukim	116.974.275,00	43.804.858.526,00	-	-	(43.687.884.251,00)
Satpol-PP	-	8.070.293.689,00	-	-	(8.070.293.689,00)
BPBD	37.900.000,00	8.382.668.821,00	-	-	(8.344.768.821,00)
Badan Kesbang	-	5.406.918.160,00	-	-	(5.406.918.160,00)
Dinas Sosial	-	7.514.040.049,00	-	-	(7.514.040.049,00)
Dinas Tenaga Kerja	701.305.170,00	7.831.802.628,00	-	-	(7.130.497.458,00)
Dinas P3AM	-	4.870.424.110,00	-	-	(4.870.424.110,00)
Dinas Lingkungan Hidup	667.115.000,00	18.395.251.569,00	-	-	(17.728.136.569,00)
Dinas Catpil	-	4.050.405.725,00	-	-	(4.050.405.725,00)
Disdalduk dan KB	-	8.877.368.827,00	-	-	(8.877.368.827,00)

Dinas Perhubungan	8.299.644.000,00	15.201.136.355,00	-	-	(6.901.492.355,00)
Badan Kominfo	-	3.775.420.363,00	-	-	(3.775.420.363,00)
Dinas Koperasi	-	6.899.839.629,00	-	-	(6.899.839.629,00)
Dinas Penanaman Modal	1.891.871.739,00	4.902.383.395,00	-	-	(3.010.511.656,00)
Dinas Kepemudaan	50.950.000,00	3.905.282.613,00	-	-	(3.854.332.613,00)
Dinas Perpustakaan	-	1.953.959.331,00	-	-	(1.953.959.331,00)
Dinas Pariwisata	-	6.149.172.667,00	-	-	(6.149.172.667,00)
Dinas Ketapang	234.281.000,00	12.820.882.167,00	-	-	(12.586.601.167,00)
DPRD	-	8.712.477.173,00	-	-	(8.712.477.173,00)
Walikota dan Wakil Walikota	-	562.300.878,00	-	-	(562.300.878,00)
Sekretariat Daerah	-	52.773.411.783,00	-	-	(52.773.411.783,00)
Sekwan	-	21.945.138.833,00	-	-	(21.945.138.833,00)
Kec.Binjai Selatan	-	6.731.277.086,00	-	-	(6.731.277.086,00)
Kec.Binjai Timur	-	7.518.771.057,00	-	-	(7.518.771.057,00)
Kec.Binjai Barat	-	4.770.251.454,00	-	-	(4.770.251.454,00)
Kec.Binjai Kota	-	5.445.654.189,00	-	-	(5.445.654.189,00)
Kec.Binjai Utara	-	7.786.588.340,00	-	-	(7.786.588.340,00)
Inspektorat	-	5.732.326.274,00	-	-	(5.732.326.274,00)
Bappeda	-	6.806.828.651,00	-	-	(6.806.828.651,00)
BPKAD selaku SKPD	46.459.663.462,38	15.026.896.108,00	-	-	31.432.767.354,38
BKPAD selaku PPKD	751.555.085.748,10	6.250.542.702,00	588.720.825,00	15.687.285.030,15	760.403.107.251,25
BKD	-	7.095.765.627,00	-	-	(7.095.765.627,00)
Jumlah	879.551.758.424,48	849.025.483.683,96	588.720.825,00	15.687.285.030,15	45.624.838.945,67

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 di atas dapat dilihat laporan realisasi anggaran per SKPD telah dicantumkan secara rinci, selain itu dari sisi pendapatan, belanja, hingga pencatatan aset per SKPD juga telah dicatatkan dengan lengkap dan mudah dipahami. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kota Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan realisasi penerimaan, belanja, penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa pengungkapan jumlah SKPD telah dicatatkan dengan jelas dan lengkap.

4. Temuan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan yang diukur dengan jumlah temuan digunakan sebagai proksi dari hasil audit BPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Sistem Informasi Keuangan Daerah, Bapak Junaidi P. Marbun, dijelaskan bahwa pengungkapan jumlah temuan pemeriksaan masih kurang, temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu persatu dalam penyajian laporan keuangan, temuan audit dijabarkan dalam bantuk tindak lanjut kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya pada tahun 2015 tim audit BPK RI memberikan rekomendasi untuk melakukan pemutahiran dan validasi data piutang PBB-P2.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun 2016 Pemerintah Kota Binjai telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi BPK tahun sebelumnya

antara lain dalam menyajikan nilai piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2015 belum melakukan pemutahiran dan validasi data piutang PBB-P2, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang lengkap tentang nilai tersebut di atas, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait yang mengakibatkan BPK tidak dapat meyakini kewajaran penyajian piutang PBB-P2 Pemerintah Kota Binjai Pada Tahun 2015. Selanjutnya, Pemerintah Kota Binjai dalam menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2015 yang di antaranya merupakan aset tanah, aset jalan pemeriharaan dicatat telah mendahului perolehan awal aset induk dan aset tetap lainnya belum disusutkan. Pemerintah Kota Binjai dalam menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2015 belum menunjukkan nilai yang wajar hal ini disebabkan karena pengurus/ penyimpan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai dan tidak mencatat beban persediaan obat secara perpetual. Inilah yang membuat dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan oleh BPK pada Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2014 berdasarkan catatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Binjai diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) (LHP, BPK Tahun 2015-2016).

Namun demikian, tidak seluruh rekomendasi atas temuan Tim Audit BPK RI seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan-temuan terdahulu yang terus dicatatkan oleh Tim Audit BPK pada LKPD tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat

dipastikan bahwa pengungkapan temuan audit belum ditindak lanjuti secara maksimal sehingga pengungkapannya dalam LKPD juga belum optimal.

Berdasarkan kelengkapan tersebut di atas, pada Tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kota Binjai berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI disamping faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pemberian opini tersebut. Dibeberapa daerah masih adanya Pemerintah Daerah yang memperoleh opini *adverse* dan *disclaimer* karena penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Namun, apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini WTP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Apakah laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah telah mencerminkan pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik.

Diantara penelitian terkait pengungkapan laporan keuangan pemerintah pernah dilakukan Hilmi (2012), Martani (2012), Setyaningrum (2012), dan Khasanah (2014). Namun, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Sedangkan Martani (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota untuk Tahun anggaran 2006. Penelitian ini menggunakan sampel 100 LKPD TA 2006 dan hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan daerah, kompleksitas, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian Hilmi

(2012), Martani (2012), serta Setyaningrum (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang diprosikan dengan total pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun hal berbeda dihasilkan dari penelitian Khasanah (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian terkait tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang hasilnya menunjukkan bahwa persentase tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah melalui LKPD masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh (Lesmana, 2010). Hasil penelitian Martani dan Lestiani (2012) dengan menggunakan data LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD sebesar 35,45%. Lesmana (2010) menyatakan tingkat pengungkapan wajib yang masih sangat rendah sebesar 22% dengan menggunakan data LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2007. Penelitian Hilmi dan Martani (2012) menyatakan hasil yang sama bahwa tingkat pengungkapan wajib atas LKPD Provinsi di Indonesia tahun 2006-2009 masih rendah yakni sebesar 44,56%. Hasil cukup tinggi diungkapkan Setyaningrum (2012), dimana tingkat pengungkapan wajib sebesar 52,09% atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Kekayaan daerah Pemerintah Kota Binjai telah di paparkan secara jelas dan lengkap pada LKPD Pemko Binjai. Seluruh jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah juga secara terperinci dijabarkan secara jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan kekayaan daerah yang di proyeksikan dengan Pendapatan Daerah telah diungkapkan dengan jelas.
2. Aset daerah Pemerintah Kota Binjai telah di tampilkan dengan lengkap dan jelas, jumlah aset dalam neraca telah jelas disebutkan nilai dan jenisnya dilampirkan dalam lampiran LKPD Pemko Binjai. Seluruh komponen aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap telah dicantumkan secara rinci. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kote Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah

Kota Binjai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa pengungkapan aset daerah telah diungkapkan dengan jelas lengkap.

3. Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan, jumlah anggaran dan realisasinya telah jelas di cantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai. Laporan realiasi anggaran per SKPD telah dicantumkan secara rinci, selain itu dari sisi pendapatan, belanja, hingga pencatatan aset per SKPD juga telah dicatatkan dengan lengkap dan mudah dipahami. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kote Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan realisasi penerimaan, belanja, penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa pengungkapan jumlah SKPD telah diungkapkan dengan jelas dan lengkap.
4. Temuan yang diukur dengan jumlah temuan yang digunakan sebagai proksi dari hasil pemeriksaan BPK. Jumlah temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu persatu dalam penyajian laporan keuangan, temuan audit dijabarkan dalam bantuk tindak lanjut kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. tidak seluruh rekomendasi atas temuan Tim Audit BPK RI seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan-temuan terdahulu yang terus dicatatkan oleh Tim Audit BPK pada LKPD tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa

pengungkapan temuan pemeriksaan BPK belum ditindaklanjuti secara maksimal sehingga pengungkapannya dalam LKPD juga belum optimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai yaitu disarankan kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa BPK tahun-tahun sebelumnya, selain untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) juga dalam rangka mencukupi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arinda Putri, Rizky. Faktor Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Universitas Dian Nuswantoro.
- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Asyrofi, M. Zaenuddin. 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/ kota di pulau jawa tahun anggaran 2014).
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Creswell, J.W. 2014. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Edisi ke-4. Sage Publications, Inc.
- Daniel, Niko Ulfandri. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Sarjana. Universitas Padang.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.

- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan. CV. Brama Ardian.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Girsang, V. 2015. Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. (2011). *Qualitative research methods*. London: Sage Publications Ltd
- Heriningsih, Rusherlistyani. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 13, Nomor 02. UPN Yogyakarta.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Lesmana, Sigit I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).

- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.
- Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. *JUMANT*, 12(2), 83-89.